

**Kerangka Acuan Kegiatan**  
**PENILAIAN KINERJA BKM (PK-BKM)**  
**Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

## **A. LATAR BELAKANG**

Program KOTAKU sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanganan kumuh secara berkelanjutan. Berdasarkan strategi KOTAKU, setiap tahunnya penyelenggaraan program dibagi kedalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan pada setiap tahapan ini diharapkan mampu menjadikan Pemerintah Kota/ Kabupaten sebagai Nakhoda dalam penanganan kumuh dan masyarakat dapat secara mandiri siap mendukung pencapaian 100 0 100.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang penting untuk setiap BKM sebagai motor penggerak Program KOTAKU ditingkat basis untuk melaksanakan penilaian terhadap progres kinerjanya melalui PENILAIAN KINERJA BKM (PK-BKM). Adapun indikator/aspek yang dinilai dalam PK BKM sudah disesuaikan dengan kerja-kerja BKM kedepan.

## **B. TUJUAN**

Penilaian ini bertujuan untuk diperolehnya progres Penilaian Kinerja BKM (PK-BKM) sebagai motor penggerak dalam penanganan kumuh tingkat basis.

Adapun tujuan khusus dari penilaian tersebut adalah :

1. Tim Fasilitator dan Pemerintah Kelurahan/desa serta BKM memahami dan menyadari indikator-indikator PK BKM dalam mengelola KOTAKU secara mandiri.
2. Tim Fasilitator mampu mendorong progres BKM dan pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengelola KOTAKU secara mandiri dan memiliki komitmen dalam mengelola KOTAKU.
3. Diketahui rangking BKM yang memiliki progres terbaik untuk mengelola KOTAKU tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional.

## **C. KELUARAN YANG DIHARAPKAN**

1. Tim Fasilitator dan BKM serta Pemerintah Kelurahan/Desa memiliki tujuan serta indikator yang sama dalam rangka mengelola KOTAKU secara mandiri.
2. Tim Fasilitator dan BKM serta Pemerintah Kelurahan/Desa secara bersama-sama mampu menilai progres kinerja BKM serta memiliki rumusan strategi pemenuhan indikator.
3. Rangking Nilai Kinerja BKM.

## D. METODOLOGI

Dilevel Kelurahan/Desa, bentuk kegiatan dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan BKM (PK BKM) ini berupa Diskusi Kelompok Terarah (DPT/FGD) dengan menggunakan format Penilaian Kinerja Kelembagaan BKM. Setelah format penilaian terisi, peserta FGD diajak merumuskan strategi dan rencana perbaikan terhadap nilai indikator yang belum maksimal.

Dilevel Tim Fasilitator, bentuk kegiatannya merekap/merangking nilai semua BKM , menginformasikannya kepada forum BKM, Kepala desa/kelurahan dan Korkot. Dilevel Tim Fasilitator juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

Dilevel Kota/Kabupaten, bentuk kegiatannya merekap/merangking nilai semua PK BKM dan menginformasikannya kepada Pemda dan FKA BKM, serta mengirimkan hasil PK BKM ke OC/OSP Provinsi. Dilevel Kota/Kabupaten juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

Dilevel Provinsi, bentuk kegiatannya merekap/merangking nilai semua PK BKM kota/kabupaten se provinsi dan menginformasikannya kepada Korkot, Pemda kabupaten/Kota dan Satker Provinsi. Dilevel provinsi juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

Dilevel Pusat, bentuk kegiatannya merekap/merangking nilai semua PK BKM yang dikirim dari Provinsi dan menayangkannya di Web KOTAKU. Dilevel Pusat juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

## E. WAKTU

Kegiatan Penilaian Kinerja BKM (PK BKM) ini dilakukan disemua Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi KOTAKU. Penilaian dilaksanakan 5 bulan sekali, khusus untuk penilaian tahun 2017 tahap 1 dilaksanakan bulan Mei-Juni dan tahap 2 bulan November-Desember .

## F. PESERTA

Peserta FGD/DPT Penilaian Kinerja (PK BKM) ini terdiri dari para stakeholder Desa/Kelurahan sebagai berikut :

No.	Unsur Peserta
1.	Tim Fasilitator
2.	Pemerintahan Kelurahan/Desa
3.	Lembaga tingkat kelurahan/desa
4.	Forum Kolaborasi

No.	Unsur Peserta
5.	Perwakilan RW/RT/Dusun
6.	Relawan
7.	Anggota BKM
8.	UPK, UPL, UPS
9.	Pihak Berkaitan lainnya.

Nara Sumber dan Pemandu :

No.	Unsur
1.	Tim Korkot
2.	Tim Fasilitator
3.	Lurah/Kades
4.	Pokja PKP, Satker, PPK

## G. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan FGD/DPT ini dibebankan kepada BOP BKM, anggaran Daerah dan atau bersamaan dengan kegiatan yang ada dalam kontrak konsultan (Pengembangan Kapasitas Masyarakat) .

## H. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh Tim Pelaksana dan BKM; dalam bentuk proceeding disertai keluaran (output) kegiatan. Laporan dibuat dan diserahkan kepada Lurah/Kades, fasilitator dan di cc ke korkot paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan selesai.

## I. PENUTUP

Kerangka acuan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai acuan bersama bagi pihak-pihak terkait, khususnya pelaksana kegiatan di kelurahan/desa, Kota/Kab dan Provinsi untuk koordinasi selama pelaksanaan kegiatan.

*Jakarta, 01 September 2016 diperbaharui 05 April 2017*

**PENILAIAN KINERJA BKM (PK BKM)****DESA/KELURAHAN :****KAB/KOTA :****PROVINSI :**

No	Aspek	Indikator	Bobot	Nilai	Batasan penilaian	Nilai Kota / Kab	Keterangan
1	<b>Pengelolaan keuangan BKM</b>	Kinerja pembukuan sekretariat	10%	2	Kinerja pembukuan sekretariat BKM Sangat Baik		sumber data pengukuran kinerja pembukuan sekretariat
				1	Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM Memadai		
				0	Kinerja pembukuan Tidak memadai		
2	<b>Partisipasi Perempuan</b>	Tingkat Partisipasi perempuan dalam penanganan kumuh di kelurahan/desa	5%	2	Tingkat partisipasi perempuan > 40%		
				1	Tingkat partisipasi perempuan 30% s.d 40%		
				0	Tingkat partisipasi perempuan < 30%		
3	<b>Penggerak Kolaborasi</b>	BKM/LKM menjadi penggerak dalam penanganan kumuh menginisiasi terbentuknya forum kolaborasi tingkat kelurahan dan aktif	10%	2	Forum kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan/Desa terbentuk dan terlibat aktif dalam penanganan kumuh, bekerjasama dengan lembaga lainnya, dan mampu mendorong lurah/kepala desa sebagai Nakhoda penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa		
				1	Forum kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan/Desa terbentuk		

				0	BKM/LKM belum menginisiasi terbentuknya forum kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan		
4	<b>Dokumen Perencanaan</b>	Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan/Desa	15%	2	Ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan/Desa dan sudah menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa		
				1	Sudah ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan/Desa		
				0	Belum ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan/Desa		
5	<b>Integrasi penganggaran</b>	Usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP di biayai oleh APBD	10%	2	Ada lebih 2 kegiatan yang bersumber dari RPLP di biayai oleh APBD		
				1	Ada kegiatan yang bersumber dari RPLP di biayai oleh APBD		
				0	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari RPLP di biayai oleh APBD		
6a	<b>Pengurangan Luasan Kumuh (Kelurahan/Desa Lokasi Kumuh)</b>	Berkurangnya persentase luasan kumuh kelurahan/desa	15%	2	Jumlah pengurangan kumuh Kelurahan/desa diatas 50%		
				1	Jumlah pengurangan kumuh Kelurahan/desa dibawah 50%		
				0	Tidak terjadi pengurangan kumuh		
6b	<b>Pencegahan Kumuh (Kelurahan/Desa Lokasi Pencegahan)</b>	Mayarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman	15%	2	Masyarakat telah menjalankan aturan bersama dan memiliki kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman		
				1	Sudah memiliki aturan bersama dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman		
				0	Belum memiliki aturan bersama dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman		

7	<b>Pengelolaan database &amp; mekanisme monitoring BKM/LKM</b>	Komputer yang ada di BKL/LKM telah digunakan sebagai alat untuk pengelolaan database dan mekanisme monitoring yang valid, akurat, tepat waktu dan mudah diakses	10%	2	BKM/LKM sudah menggunakan Komputer untuk pengelolaan database dan mekanisme monitoring yang berkualitas; dicirikan dengan informasi yang valid, akurat, tepat waktu dan mudah diakses		
				1	BKM/LKM sudah menggunakan Komputer untuk pengelolaan database dan mekanisme monitoring		
				0	BKM/LKM belum menggunakan Komputer untuk pengelolaan database dan mekanisme monitoring		
8	<b>Kualitas Infrastruktur</b>	Hasil sertifikasi infrastruktur yang dibangun masyarakat	15%	2	> 98% infrastruktur berkualitas baik & bermanfaat		
				1	90 - 97% infratsruktur berkualitas baik & bermanfaat		
				0	< 90% infrastruktur berkualitas baik & bermanfaat		
8	<b>Capacity Building (Pengembangan Kapasitas)</b>	Dukungan kegiatan Pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat	5%	2	Ada lebih dari 2 kegiatan pengembangan kapasitas dari pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat		
				1	Ada kegiatan pengembangan kapasitas dari pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat		
				0	Belum ada kegiatan pengembangan kapasitas dari pihak lain kepada BKM/LKM/Masyarakat		
10	<b>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</b>	Layananan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	5%	2	Layananan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di BKM/LKM aktif dan responsif		
				1	BKM/LKM sudah memiliki Layananan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		
				0	BKM/LKM belum memiliki layananan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		

